

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan penyampaian laporan, kesalahan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian klasifikasi akun, serta lemahnya pengelolaan aset dan rekonsiliasi data. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam SAP dengan praktik pengelolaan keuangan di lapangan.

Secara empiris, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai temuan terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut meliputi salah saji pencatatan akun, kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya keandalan dan relevansi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Selain itu, keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga masih sering terjadi. Keterlambatan ini menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pencatatan, tetapi juga oleh sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan yang digunakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian Pakpahan et al. (2022) juga menyatakan bahwa lemahnya pengendalian internal dapat menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Florencia dan Saleh (2023) menemukan bahwa sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain itu, penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, sistem informasi yang digunakan, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi informasi keuangan.

Penerapan SIPD diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Namun demikian, dalam implementasinya SIPD masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian Sudiartini (2022) menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum berjalan optimal karena keterbatasan pemahaman aparaturnya serta kurangnya pelatihan. Penelitian Khoirunnisa (2023) menemukan bahwa gangguan sistem dan keterbatasan jaringan internet menjadi hambatan dalam penggunaan SIPD. Selain itu, penelitian Nafisah (2023) menunjukkan bahwa belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan penggunaan SIPD belum efektif.

Lebih lanjut, penelitian Kania (2025) menunjukkan bahwa SIPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa didukung oleh faktor lain seperti sumber daya manusia dan pengendalian internal.

Di sisi lain, penelitian Florencia dan Saleh (2023) serta Katili et al. (2025) menunjukkan bahwa SIPD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan masih belum konsisten.

Selain SIPD, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi, termasuk dalam hal keandalan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPI bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, kecurangan, serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, lemahnya pengendalian internal dapat meningkatkan risiko kesalahan dan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Pakpahan et al. (2022) juga menyatakan bahwa kelemahan SPI dapat menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian Katili et al. (2025) menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun demikian, efektivitas SPI sangat bergantung pada kondisi organisasi, kompetensi aparatur, serta komitmen pimpinan dalam menerapkan pengendalian internal. Hal ini menyebabkan tingkat pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan dapat berbeda pada setiap daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat pemerintah daerah secara umum, sedangkan penelitian pada tingkat kecamatan masih terbatas. Kecamatan sebagai unit pemerintahan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada tingkat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua kesenjangan penelitian (research gap), yaitu: (1) adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan, serta (2) masih terbatasnya penelitian pada tingkat kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan hubungan antara penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat kecamatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan (KLK) pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
4. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
3. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kecamatan di Kabupaten Indramayu?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, terutama yang membahas sistem informasi dan pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi

pemerintahan dan pengendalian internal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan objek penelitian yang berbeda.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian pada kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kecamatan merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap pengolahan dan analisis data, guna memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.